

PROTEKSIONISME GLOBAL DAN PILIHAN STRATEGIS INDONESIA

Infografik Komprehensif Satu Halaman

Oleh: Rudy C Tarumingkeng

Dari liberalisasi menuju keterbukaan strategis

1 KONTEKS GLOBAL 2025–2026



- WTO: perdagangan barang dunia tumbuh **4,6%** (2025) → melambat menjadi **1,9%** (2026)



- Perdagangan jasa dunia: **5,3%** (2025) → **4,8%** (2026)



- World Bank: pertumbuhan ekonomi global sekitar **2,5%** pada 2026



- UNCTAD: tarif dan hambatan perdagangan tetap dipakai sebagai alat strategis pada 2026



Meningkatnya penggunaan tarif, subsidi, dan kebijakan non-tarif oleh banyak negara.

2 MENGAPA PROTEKSIONISME MENGUAT?



1. Ketegangan geopolitik & perang dagang



2. Keamanan rantai pasok



3. Subsidi industri & persaingan teknologi



4. Transisi energi & standar karbon



5. Populisme ekonomi & perlindungan tenaga kerja

3 RISIKO BAGI INDONESIA



- Pasar ekspor makin ketat
- Standar hijau/CBAM menambah biaya kepatuhan
- Harga komoditas dan permintaan global makin volatil
- Rantai pasok global terfragmentasi
- Industri domestik berisiko tertinggal jika produktivitas lemah

4 PELUANG STRATEGIS INDONESIA



Diversifikasi pasar ekspor



Hilirisasi mineral & nilai tambah domestik



ASEAN sebagai basis rantai pasok regional



Industri hijau, baterai, dan manufaktur bernilai tambah



Pemanfaatan pergeseran supply chain global



5 DATA INDONESIA

Ekspor Indonesia 2025:



US\$282,91
miliar
(+6,15%)

Ekspor nonmigas 2025:



US\$269,84
miliar
(+7,66%)

Surplus perdagangan 2025:



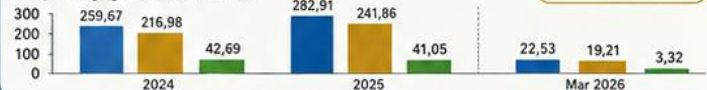
US\$41,05
miliar

Maret 2026:



ekspor
US\$22,53
miliar
impor
US\$19,21
miliar

Kinerja Perdagangan Indonesia (US\$ miliar)



6 PILIHAN STRATEGIS INDONESIA



Keterbukaan strategis, bukan menutup diri



Proteksi selektif yang disiplin dan sementara



Perkuat hilirisasi berbasis teknologi & standar lingkungan



Diversifikasi pasar: Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika, Amerika Latin



Naikkan kelas UMKM ekspor & efisiensi logistik



Perkuat diplomasi dagang, ASEAN, dan kesiapan menghadapi CBAM



PESAN UTAMA

Indonesia tidak boleh menjadi korban proteksionisme global, tetapi harus menjadi pemain strategis. Kuncinya adalah keterbukaan yang cerdas, hilirisasi yang produktif, diversifikasi pasar, dan daya saing nasional yang kuat.



Sumber ringkas: WTO, World Bank, UNCTAD, BPS, Kemendag, 2025–2026.

*Rudy C Tarumingkeng: Proteksionisme Global dan Pilihan Strategis
Indonesia?*

Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Professor of Management NUP: 9903252922

Professor Emeritus, IPB-University

Anggota MPR-RI, 1982-1987

Dekan Fak. Kehutanan IPB University. 1967-1968, 1968-1971, 1977-1978

Rektor, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan

Rektor, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rektor, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Ketua, Dewan Guru Besar, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Ketua, Senat Akademik, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

© RudyCT Academic Series

rudict75@gmail.com

24 Juni 2026

PROTEKSIONISME GLOBAL DAN PILIHAN STRATEGIS INDONESIA?

Abstrak

Proteksionisme global kembali menjadi salah satu ciri utama ekonomi-politik internasional kontemporer. Setelah beberapa dekade globalisasi didorong oleh liberalisasi perdagangan, efisiensi rantai pasok, dan integrasi pasar, dunia kini memasuki fase baru yang ditandai oleh tarif, subsidi industri, pembatasan ekspor, *investment screening*, standar teknis, kebijakan kandungan lokal, sanksi ekonomi, serta kebijakan hijau yang berdampak pada perdagangan lintas negara. Proteksionisme tidak lagi hanya muncul dalam bentuk tarif klasik, tetapi juga dalam bentuk “proteksionisme strategis” yang dibungkus dengan alasan keamanan nasional, ketahanan rantai pasok, transisi energi, perlindungan tenaga kerja, kedaulatan teknologi, dan pengurangan emisi karbon.

WTO memperkirakan pertumbuhan volume perdagangan barang dunia melambat dari 4,6% pada 2025 menjadi 1,9% pada 2026, sebelum naik menjadi 2,6% pada 2027; perdagangan jasa juga diproyeksikan melambat dari 5,3% pada 2025 menjadi 4,8% pada 2026. WTO menilai risiko perdagangan global terutama datang dari ketidakpastian kebijakan, harga energi, konflik geopolitik, dan normalisasi kembali setelah lonjakan perdagangan barang terkait AI pada 2025. ([World Trade Organization](#)) World Bank memproyeksikan pertumbuhan global melambat menjadi sekitar 2,5% pada 2026 di tengah ketidakpastian kebijakan, tekanan energi, konflik kawasan, dan risiko perlambatan perdagangan. ([World Bank](#))

UNCTAD juga mencatat bahwa tarif diperkirakan terus digunakan sebagai alat proteksionis dan strategis pada 2026, setelah penggunaannya meningkat tajam pada 2025, terutama di sektor manufaktur. ([UN Trade and Development \(UNCTAD\)](#))

Bagi Indonesia, proteksionisme global menghadirkan risiko sekaligus peluang. Risiko muncul karena pasar ekspor dapat semakin tertutup, standar lingkungan dan teknologi makin ketat, harga komoditas semakin volatil, serta rantai pasok global makin terfragmentasi. Namun peluang juga terbuka: Indonesia dapat memanfaatkan diversifikasi rantai pasok, memperkuat hilirisasi, mengembangkan industri berbasis mineral kritis, memperluas pasar nontradisional, memperdalam integrasi ASEAN, dan membangun daya saing melalui standar, teknologi, serta tata kelola. Pada 2025, ekspor Indonesia mencapai US\$282,91 miliar atau naik 6,15% dibanding 2024, sedangkan ekspor nonmigas mencapai US\$269,84 miliar atau naik 7,66%; surplus perdagangan 2025 dilaporkan mencapai US\$41,05 miliar. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Artikel ini berargumen bahwa pilihan strategis Indonesia bukanlah kembali pada proteksionisme tertutup, tetapi membangun **keterbukaan strategis**: terbuka terhadap perdagangan dan investasi, tetapi tidak pasif; aktif membangun industri domestik, tetapi tidak terjebak rente; menggunakan proteksi selektif bila diperlukan, tetapi dengan batas waktu, indikator kinerja, transparansi, dan disiplin persaingan. Indonesia membutuhkan strategi perdagangan yang cerdas: diversifikasi pasar, penguatan ASEAN, diplomasi ekonomi, hilirisasi bernilai tambah, industri hijau, kesiapan menghadapi CBAM, penguatan UMKM ekspor, efisiensi logistik, dan tata kelola kebijakan industri yang akuntabel.

Kata kunci: *proteksionisme global, perdagangan internasional, tarif, fragmentasi ekonomi, Indonesia, hilirisasi, ASEAN, rantai pasok global, kebijakan industri, daya saing nasional.*

1. Pendahuluan

Proteksionisme bukan fenomena baru. Sejak awal sejarah perdagangan modern, negara selalu berupaya melindungi kepentingan ekonominya melalui tarif, kuota, subsidi, larangan impor, atau pembatasan ekspor. Namun proteksionisme global abad ke-21 memiliki wajah yang berbeda. Ia tidak hanya muncul sebagai tarif bea masuk yang terang-terangan, tetapi juga sebagai kebijakan industri, standar lingkungan, syarat kandungan lokal, pembatasan teknologi, keamanan siber, pengawasan investasi asing, subsidi energi bersih, sanksi geopolitik, dan pengendalian ekspor mineral atau semikonduktor.

Perubahan ini menunjukkan bahwa globalisasi tidak sedang berakhir secara total, tetapi sedang berubah bentuk. Dunia tidak kembali sepenuhnya ke autarki, tetapi bergerak dari globalisasi berbasis efisiensi menuju globalisasi berbasis keamanan, ketahanan, dan kekuasaan. Perusahaan tidak lagi hanya bertanya di mana biaya produksi paling murah, tetapi juga di mana rantai pasok paling aman. Negara tidak lagi hanya bertanya bagaimana memperbesar perdagangan, tetapi juga bagaimana mengamankan teknologi, energi, pangan, mineral kritis, data, dan lapangan kerja domestik.

Bagi Indonesia, perubahan ini sangat penting. Indonesia adalah negara besar dengan pasar domestik luas, sumber daya alam strategis, posisi geografis penting, dan ambisi menjadi negara industri maju. Namun Indonesia juga bergantung pada perdagangan internasional: ekspor komoditas, manufaktur, mineral, sawit, batubara, nikel, produk olahan, serta impor bahan baku, barang modal, teknologi, dan energi. Karena itu, proteksionisme global bukan hanya isu luar negeri, tetapi isu pembangunan nasional.

Pada satu sisi, proteksionisme global dapat membatasi ekspor Indonesia. Negara tujuan ekspor dapat menaikkan tarif, memperketat standar

lingkungan, menerapkan aturan karbon, atau memprioritaskan pemasok domestik. Di sisi lain, fragmentasi rantai pasok dapat membuka peluang bagi Indonesia untuk menjadi lokasi produksi alternatif, terutama jika perusahaan global mencari diversifikasi dari konsentrasi produksi di negara tertentu. WTO mencatat bahwa ekonomi Asia menjadi penyumbang utama pertumbuhan perdagangan dunia pada 2025, antara lain karena rantai nilai terkait AI, ekspor teknologi, dan reorientasi pasokan ke pasar berkembang. ([World Trade Organization](#))

Pertanyaan utama artikel ini adalah: **bagaimana Indonesia harus memilih strategi di tengah dunia yang semakin proteksionis?** Apakah Indonesia harus ikut menutup diri? Apakah Indonesia harus tetap membuka pasar sepenuhnya? Ataukah Indonesia perlu mengambil jalan tengah yang lebih cerdas: terbuka tetapi strategis, melindungi tetapi tidak memanjakan, melakukan hilirisasi tetapi tidak menciptakan rente, dan memperkuat industri domestik tetapi tetap disiplin terhadap produktivitas?

2. Memahami Proteksionisme Global

Proteksionisme adalah kebijakan negara untuk melindungi produsen, pekerja, sektor strategis, atau kepentingan nasional dari tekanan persaingan asing. Bentuk klasiknya adalah tarif impor. Namun, dalam praktik modern, proteksionisme memiliki banyak instrumen.

Pertama, **tarif**. Ini adalah bea masuk atas barang impor. Tarif menaikkan harga barang asing sehingga produsen domestik lebih terlindungi. Namun tarif juga menaikkan biaya bagi konsumen dan industri yang memakai input impor.

Kedua, **kuota dan larangan impor**. Negara membatasi jumlah barang yang boleh masuk atau melarang barang tertentu. Instrumen ini lebih keras daripada tarif karena secara langsung membatasi volume perdagangan.

Ketiga, **subsidi industri**. Pemerintah memberi bantuan kepada perusahaan domestik agar lebih kompetitif. Subsidi dapat berupa hibah, kredit murah, insentif pajak, energi murah, lahan, atau dukungan riset.

Keempat, **standar teknis dan sanitari**. Negara menetapkan standar kualitas, keamanan pangan, lingkungan, atau kesehatan. Standar dapat sah untuk melindungi publik, tetapi juga dapat menjadi hambatan non-tarif bila terlalu diskriminatif.

Kelima, **kebijakan kandungan lokal**. Pemerintah mewajibkan produk atau proyek memakai komponen lokal dalam proporsi tertentu. Tujuannya membangun industri domestik, tetapi dapat memicu sengketa dagang bila melanggar komitmen internasional.

Keenam, **pembatasan ekspor**. Negara membatasi ekspor komoditas strategis, misalnya pangan, energi, mineral, atau teknologi, untuk menjaga pasokan domestik atau membangun hilirisasi.

Ketujuh, **investment screening**. Pemerintah menyeleksi investasi asing dengan alasan keamanan nasional, teknologi strategis, atau kontrol aset penting.

Kedelapan, **green protectionism**. Kebijakan lingkungan seperti standar karbon, CBAM, atau persyaratan keberlanjutan dapat menjadi instrumen iklim, tetapi juga dapat berdampak proteksionis bagi negara berkembang. Uni Eropa menyatakan CBAM masuk ke rezim definitif mulai 2026 setelah fase transisi 2023–2025. ([Taxation and Customs Union](#))

Karena itu, proteksionisme global saat ini tidak dapat dipahami hanya sebagai perang tarif. Proteksionisme telah melebur dengan keamanan nasional, geopolitik, teknologi, lingkungan, industri hijau, dan strategi rantai pasok.

3. Mengapa Proteksionisme Kembali Menguat?

Ada beberapa alasan proteksionisme kembali menguat.

Pertama, **kekecewaan terhadap globalisasi lama**. Globalisasi menurunkan harga barang dan memperluas perdagangan, tetapi di banyak negara juga menimbulkan deindustrialisasi, kehilangan pekerjaan manufaktur, ketimpangan wilayah, dan kemarahan politik. Di negara maju, sebagian pekerja merasa dikorbankan oleh perdagangan bebas dan relokasi industri.

Kedua, **krisis rantai pasok**. Pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa rantai pasok global yang terlalu efisien tetapi terlalu terkonsentrasi dapat rapuh. Ketika produksi masker, obat, chip, atau alat kesehatan terganggu, negara mulai memikirkan ulang ketergantungan impor.

Ketiga, **geopolitik**. Rivalitas Amerika Serikat–China, perang teknologi, sanksi Rusia, konflik Timur Tengah, dan kompetisi Indo-Pasifik membuat perdagangan semakin dipolitisasi. Barang bukan lagi sekadar barang; semikonduktor, baterai, mineral kritis, AI, dan energi dipandang sebagai instrumen kekuasaan.

Keempat, **transisi energi**. Negara-negara berlomba menguasai industri masa depan: baterai, kendaraan listrik, panel surya, hidrogen, semikonduktor, dan energi bersih. Subsidi industri dan standar karbon menjadi alat persaingan baru.

Kelima, **populisme ekonomi**. Politisi sering memakai proteksionisme untuk menunjukkan keberpihakan kepada pekerja dan industri domestik. Tarif terlihat sederhana dan populer, meskipun dampak ekonominya sering kompleks.

Keenam, **ketidakpastian makro global**. IMF pada 2026 mencatat ekonomi global menghadapi tekanan konflik, harga komoditas, ekspektasi inflasi, dan kondisi keuangan yang lebih ketat; kondisi seperti ini mendorong negara lebih defensif dalam kebijakan ekonomi. ([IMF](#))

Proteksionisme menguat bukan karena dunia berhenti membutuhkan perdagangan, tetapi karena perdagangan kini dipandang melalui lensa risiko. Negara ingin tetap berdagang, tetapi dengan kontrol lebih besar.

4. Dampak Proteksionisme terhadap Ekonomi Global

Proteksionisme memiliki dampak yang tidak sederhana. Dalam jangka pendek, proteksi dapat membantu industri tertentu bertahan, menjaga lapangan kerja di sektor tertentu, dan memberi waktu bagi perusahaan domestik menyesuaikan diri. Namun dalam jangka panjang, proteksionisme yang berlebihan dapat menurunkan efisiensi, menaikkan harga, mengurangi inovasi, memicu retaliasi, dan melemahkan pertumbuhan.

WTO memperkirakan pertumbuhan perdagangan barang dunia melambat pada 2026, setelah pertumbuhan 2025 yang lebih kuat dari perkiraan. Dalam skenario baseline WTO, volume perdagangan barang turun dari pertumbuhan 4,6% pada 2025 menjadi 1,9% pada 2026; jika harga minyak tetap tinggi akibat konflik Timur Tengah, pertumbuhan dapat turun lebih jauh ke sekitar 1,4%. ([World Trade Organization](#))

Proteksionisme menciptakan setidaknya lima dampak global.

Pertama, **biaya produksi meningkat**. Banyak industri modern memakai input dari banyak negara. Tarif atas input membuat biaya produksi naik dan dapat melemahkan daya saing ekspor.

Kedua, **inflasi barang tertentu meningkat**. Konsumen membayar lebih mahal ketika impor dikenai tarif atau dibatasi.

Ketiga, **rantai pasok terfragmentasi**. Perusahaan harus mencari pemasok baru, memindahkan pabrik, atau membangun stok lebih besar. Ini menambah biaya.

Keempat, **ketidakpastian investasi meningkat**. Investor ragu bila aturan dagang berubah cepat. OECD mencatat perubahan tarif dan ketidakpastian kebijakan perdagangan dapat memperpanjang ketidakpastian meskipun sebagian tarif efektif turun dari asumsi sebelumnya. ([OECD](#))

Kelima, **negara berkembang rentan tertinggal**. Negara maju memiliki kapasitas fiskal untuk memberi subsidi besar kepada industri domestik, sedangkan negara berkembang sering tidak mampu menandingi skala subsidi tersebut.

Dengan demikian, proteksionisme dapat menjadi alat defensif, tetapi jika digunakan berlebihan dapat menjadi beban kolektif bagi ekonomi dunia.

5. Proteksionisme Hijau: Antara Iklim dan Perdagangan

Salah satu bentuk baru proteksionisme adalah kebijakan perdagangan hijau. Secara prinsip, kebijakan hijau penting karena perubahan iklim membutuhkan transformasi produksi global. Industri harus menurunkan emisi, energi fosil harus dikurangi, dan perdagangan harus mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon. Namun dalam praktik, kebijakan hijau dapat menimbulkan ketegangan bila standar diterapkan secara tidak seimbang antara negara maju dan negara berkembang.

CBAM Uni Eropa adalah contoh penting. Tujuannya adalah mencegah *carbon leakage*, yaitu perpindahan produksi beremisi tinggi ke negara yang aturan karbonnya lebih longgar. Namun bagi eksportir dari negara berkembang, CBAM dapat berarti biaya tambahan, tuntutan pelaporan emisi, kebutuhan sertifikasi, dan tekanan untuk melakukan dekarbonisasi industri lebih cepat. Komisi Eropa menyatakan CBAM mulai berlaku dalam rezim definitif pada 2026 setelah fase transisi 2023–2025. ([Taxation and Customs Union](#))

Bagi Indonesia, isu ini penting karena struktur ekspor dan hilirisasi masih terkait dengan energi, mineral, logam, pupuk, semen, baja, aluminium, dan produk intensif energi. Jika industri Indonesia tidak menurunkan intensitas karbon, produk Indonesia dapat menghadapi biaya atau hambatan akses di pasar yang menerapkan standar karbon.

Namun CBAM juga dapat menjadi peluang. Jika Indonesia mampu membangun sistem pengukuran emisi, memperkuat energi terbarukan, menerapkan harga karbon yang kredibel, dan mendorong industri hijau, maka produk Indonesia dapat lebih kompetitif di pasar masa depan. Dengan demikian, respons terhadap proteksionisme hijau bukan sekadar menolak, tetapi juga meningkatkan kapasitas nasional.

6. Indonesia di Tengah Perdagangan Global yang Berubah

Indonesia memiliki posisi yang unik. Indonesia bukan negara kecil yang hanya bergantung pada ekspor, tetapi juga bukan ekonomi tertutup. Pasar domestik besar memberi bantalan, tetapi perdagangan tetap penting bagi pertumbuhan, devisa, industri, teknologi, dan lapangan kerja.

Pada 2025, ekspor Indonesia mencapai US\$282,91 miliar, naik 6,15% dibanding 2024, dan ekspor nonmigas mencapai US\$269,84 miliar, naik 7,66%. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#)) Kementerian Perdagangan menyatakan surplus neraca perdagangan Indonesia pada 2025 mencapai US\$41,05 miliar, naik 31,03% dibanding surplus 2024 sebesar US\$31,33 miliar. ([Ministry of Trade](#)) Pada Maret 2026, BPS mencatat ekspor Indonesia sebesar US\$22,53 miliar dan impor sebesar US\$19,21 miliar. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Data tersebut menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki kekuatan perdagangan, terutama pada nonmigas. Namun surplus perdagangan tidak boleh membuat Indonesia terlena. Surplus dapat berasal dari komoditas atau harga tertentu, dan dapat berubah ketika harga global turun atau permintaan melemah. Tantangan Indonesia adalah memperluas ekspor bernilai tambah tinggi dan mengurangi ketergantungan pada komoditas primer.

Dalam konteks proteksionisme global, Indonesia menghadapi empat tekanan besar.

Pertama, **ketergantungan komoditas**. Batubara, sawit, nikel, dan mineral memberi devisa, tetapi rentan terhadap harga global, kebijakan lingkungan, dan sengketa perdagangan.

Kedua, **standar pasar tujuan ekspor makin ketat**. Uni Eropa, Amerika Serikat, Jepang, dan negara maju lain semakin menuntut standar lingkungan, ketenagakerjaan, keamanan produk, dan rantai pasok.

Ketiga, **kompetisi industri meningkat**. Negara lain juga mendorong manufaktur, kendaraan listrik, baterai, dan teknologi hijau dengan subsidi besar.

Keempat, **rantai pasok bergeser**. Perusahaan global mencari diversifikasi, tetapi hanya negara dengan infrastruktur, regulasi, tenaga kerja, energi, dan kepastian hukum baik yang dapat menangkap peluang.

Indonesia harus bergerak dari perdagangan berbasis komoditas menuju perdagangan berbasis produktivitas.

7. Hilirisasi: Jawaban Strategis atau Risiko Proteksionisme Baru?

Hilirisasi adalah salah satu strategi utama Indonesia untuk menghadapi struktur perdagangan global. Ide dasarnya benar: Indonesia tidak boleh terus mengekspor bahan mentah dengan nilai tambah rendah. Indonesia harus mengolah sumber daya alam di dalam negeri, membangun industri, menciptakan pekerjaan, dan meningkatkan posisi dalam rantai nilai global.

Namun hilirisasi harus dikelola dengan hati-hati. Jika hilirisasi dilakukan hanya dengan larangan ekspor bahan mentah tanpa kesiapan industri, energi, teknologi, lingkungan, dan pasar, maka hilirisasi dapat berubah menjadi distorsi. Jika hilirisasi hanya menguntungkan segelintir pelaku besar, maka ia dapat menciptakan rente baru. Jika hilirisasi memakai energi kotor dan tidak transparan, maka produk hilir Indonesia dapat menghadapi hambatan karbon di pasar global.

Hilirisasi yang sehat harus memiliki tujuh ciri.

Pertama, **meningkatkan nilai tambah domestik** secara nyata, bukan hanya memindahkan tahap produksi sederhana.

Kedua, **menciptakan transfer teknologi** dan kemampuan industri nasional.

Ketiga, **melibatkan pemasok lokal dan UMKM** dalam rantai pasok.

Keempat, **memperkuat tenaga kerja terampil** melalui pendidikan vokasi dan pelatihan.

Kelima, **memenuhi standar lingkungan dan sosial**.

Keenam, **berorientasi ekspor dan pasar global**, bukan hanya pasar domestik terlindungi.

Ketujuh, **memiliki disiplin kinerja**: insentif diberikan bila industri mencapai target produktivitas, ekspor, inovasi, dan emisi.

Hilirisasi tidak boleh menjadi proteksionisme malas. Hilirisasi harus menjadi industrialisasi cerdas.

8. ASEAN dan Regionalisme sebagai Ruang Strategis

Dalam dunia yang semakin terfragmentasi, ASEAN menjadi semakin penting bagi Indonesia. ASEAN bukan hanya forum diplomasi, tetapi ruang ekonomi, rantai pasok, dan pasar regional. Ketika negara besar saling menaikkan hambatan, kawasan yang stabil dan terbuka dapat menjadi jangkar.

Indonesia perlu memperkuat ASEAN dalam beberapa dimensi.

Pertama, **integrasi pasar regional**. Standar, prosedur bea cukai, logistik, pembayaran digital, dan aturan investasi harus semakin harmonis agar perdagangan intra-ASEAN meningkat.

Kedua, **rantai pasok regional**. Indonesia dapat menjadi bagian dari jaringan produksi ASEAN, bukan hanya eksportir komoditas. Industri

otomotif, elektronik, makanan, farmasi, baterai, dan jasa digital dapat diperkuat melalui rantai pasok regional.

Ketiga, **diplomasi kolektif**. ASEAN memiliki daya tawar lebih besar jika bernegosiasi secara kolektif dengan mitra besar seperti China, Uni Eropa, Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, India, dan Australia.

Keempat, **RCEP dan perjanjian ekonomi regional**. Indonesia dapat memanfaatkan perjanjian regional untuk memperluas akses pasar, tetapi harus memastikan pelaku domestik siap bersaing.

Kelima, **standar hijau dan digital ASEAN**. Kawasan perlu membangun standar bersama agar tidak hanya menjadi penerima standar dari negara maju.

Bagi Indonesia, strategi regional bukan alternatif dari globalisasi, tetapi cara mengelola globalisasi yang lebih aman.

9. Diversifikasi Pasar Ekspor

Salah satu risiko proteksionisme global adalah ketergantungan pada sedikit pasar. Jika pasar utama menaikkan tarif atau standar, ekspor dapat terganggu. Karena itu, Indonesia perlu memperluas pasar ekspor ke Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika, Amerika Latin, dan kawasan nontradisional lain.

WTO mencatat pada 2025 sebagian ekonomi Asia menyesuaikan penurunan akses pasar di Amerika Utara dengan mereorientasi pasokan ke pasar berkembang yang tumbuh cepat, termasuk Amerika Selatan dan Afrika. ([World Trade Organization](#)) Ini memberi pelajaran bagi Indonesia: diversifikasi bukan hanya slogan, tetapi strategi praktis untuk mengurangi risiko.

Diversifikasi pasar membutuhkan kerja serius. Produk harus sesuai standar lokal. Diplomasi perdagangan harus aktif. Perjanjian dagang harus dipilih strategis. Pembiayaan ekspor harus diperkuat. Informasi pasar harus

tersedia bagi UMKM. Logistik dan pelabuhan harus mendukung. Perwakilan dagang Indonesia harus berfungsi sebagai intelijen pasar, bukan sekadar simbol diplomatik.

Pasar nontradisional tidak selalu mudah. Risiko pembayaran, standar, logistik, politik, dan bahasa dapat menjadi hambatan. Namun jika Indonesia ingin mengurangi ketergantungan pada pasar tradisional yang makin proteksionis, diversifikasi harus menjadi agenda nasional.

10. UMKM Ekspor dan Demokratisasi Perdagangan

Proteksionisme global sering dibahas dari perspektif negara dan korporasi besar. Namun pelaku kecil juga terdampak. UMKM menghadapi standar ekspor, sertifikasi, biaya logistik, pembiayaan, mata uang, bahasa, dan akses informasi yang lebih berat. Ketika negara tujuan ekspor memperketat standar, UMKM yang tidak memiliki kapasitas kepatuhan akan lebih mudah tersingkir.

Indonesia perlu membangun demokratisasi perdagangan: lebih banyak UMKM dapat menjadi eksportir langsung atau bagian dari rantai pasok ekspor. Hal ini membutuhkan kebijakan yang konkret.

Pertama, **pusat layanan ekspor UMKM** yang membantu sertifikasi, desain produk, kemasan, legalitas, dan standar.

Kedua, **pembiayaan ekspor** yang mudah diakses dan tidak hanya dinikmati perusahaan besar.

Ketiga, **platform digital ekspor** yang menghubungkan UMKM dengan pembeli global.

Keempat, **agregator dan koperasi modern** untuk mengatasi skala produksi yang kecil.

Kelima, **pengadaan pemerintah dan BUMN** sebagai jembatan standardisasi produk.

Keenam, **diplomasi dagang berbasis produk lokal.**

Jika perdagangan internasional hanya dinikmati korporasi besar, maka manfaat globalisasi tidak merata. Strategi Indonesia harus membuat ekspor menjadi tangga mobilitas ekonomi rakyat.

11. Proteksi Selektif: Kapan Diperlukan dan Kapan Berbahaya?

Tidak semua proteksi salah. Dalam sejarah pembangunan, banyak negara memakai proteksi selektif untuk membangun industri muda. Namun proteksi menjadi berbahaya bila tidak memiliki batas waktu, tidak disertai target kinerja, dan menciptakan ketergantungan permanen.

Proteksi selektif dapat dibenarkan bila memenuhi syarat berikut.

Pertama, sektor tersebut memiliki potensi belajar dan produktivitas jangka panjang.

Kedua, ada kegagalan pasar yang nyata, misalnya kebutuhan investasi awal besar, risiko teknologi tinggi, atau koordinasi rantai pasok.

Ketiga, proteksi bersifat sementara.

Keempat, perusahaan penerima perlindungan wajib memenuhi indikator kinerja: produktivitas, ekspor, inovasi, kandungan lokal, transfer teknologi, atau penyerapan tenaga kerja berkualitas.

Kelima, ada evaluasi independen.

Keenam, proteksi tidak boleh menjadi hadiah politik kepada kelompok tertentu.

Proteksi tanpa disiplin akan menciptakan industri manja. Industri terlindungi tetapi tidak efisien; konsumen membayar mahal; negara kehilangan penerimaan; dan pelaku usaha produktif tersingkir oleh pelaku yang dekat dengan kekuasaan. Ini adalah risiko besar bagi Indonesia.

Dengan demikian, Indonesia membutuhkan **strategic protection**, bukan **lazy protectionism**.

12. Daya Saing Domestik: Jawaban Terbaik terhadap Proteksionisme

Dalam dunia proteksionis, respons terbaik bukan sekadar membalas proteksi dengan proteksi. Respons terbaik adalah meningkatkan daya saing domestik.

Daya saing domestik mencakup beberapa hal.

Pertama, **logistik efisien**. Biaya logistik tinggi membuat produk Indonesia kalah sebelum masuk pasar global.

Kedua, **energi kompetitif dan bersih**. Industri masa depan membutuhkan energi yang andal, murah, dan rendah karbon.

Ketiga, **SDM terampil**. Manufaktur modern, AI, energi hijau, dan jasa digital membutuhkan tenaga kerja berkualitas.

Keempat, **regulasi konsisten**. Investor dan eksportir membutuhkan kepastian aturan.

Kelima, **inovasi dan riset**. Tanpa inovasi, Indonesia hanya bersaing harga.

Keenam, **standar dan sertifikasi**. Negara yang mampu memenuhi standar global akan lebih mudah menembus pasar.

Ketujuh, **pembiayaan produktif**. Industri dan UMKM membutuhkan modal jangka panjang.

Proteksionisme global mempersempit ruang bermain. Karena itu, Indonesia harus menjadi lebih siap, bukan lebih tertutup.

13. Diplomasi Perdagangan dan Tata Kelola Global

Indonesia harus tetap memperjuangkan sistem perdagangan berbasis aturan. WTO tidak sempurna dan sistem penyelesaian sengketa masih menghadapi masalah, tetapi sistem multilateral tetap penting bagi negara berkembang. Tanpa aturan multilateral, negara besar dapat lebih mudah memaksakan kepentingannya.

Indonesia perlu aktif dalam diplomasi perdagangan pada beberapa level.

Pertama, **WTO**. Indonesia harus memperjuangkan reformasi WTO, penyelesaian sengketa yang berfungsi, dan ruang kebijakan bagi negara berkembang.

Kedua, **ASEAN**. Indonesia harus memperkuat posisi kolektif kawasan.

Ketiga, **perjanjian dagang bilateral dan regional**. Indonesia perlu memilih perjanjian yang membuka pasar, tetapi tetap menjaga ruang pembangunan.

Keempat, **diplomasi standar**. Indonesia harus ikut membentuk standar global, bukan hanya menjadi penerima standar.

Kelima, **diplomasi hijau**. Indonesia perlu memperjuangkan pengakuan terhadap perbedaan kapasitas negara berkembang dalam kebijakan karbon, sambil memperkuat dekarbonisasi domestik.

Keenam, **diplomasi mineral kritis**. Nikel, tembaga, bauksit, dan mineral strategis harus dikelola dalam kerangka kerja sama yang memberi nilai tambah nasional.

Diplomasi perdagangan bukan hanya tugas Kementerian Perdagangan. Ia harus melibatkan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, BKPM, BUMN, daerah, akademisi, asosiasi usaha, dan pelaku UMKM.

14. Risiko Salah Arah: Nasionalisme Ekonomi yang Tidak Produktif

Proteksionisme global dapat menggoda Indonesia untuk mengambil jalan nasionalisme ekonomi yang keras. Nasionalisme ekonomi tidak selalu salah; negara harus memperjuangkan kepentingan nasional. Namun nasionalisme ekonomi menjadi berbahaya bila berubah menjadi anti-kompetisi, anti-transparansi, dan anti-produktivitas.

Ada beberapa bentuk salah arah.

Pertama, **menutup impor bahan baku yang dibutuhkan industri**. Ini dapat melemahkan manufaktur domestik.

Kedua, **memberi proteksi permanen kepada industri tidak efisien**. Ini membebani konsumen dan APBN.

Ketiga, **menggunakan BUMN atau badan negara untuk menguasai perdagangan tanpa tata kelola jelas**. Ini berisiko menciptakan rente.

Keempat, **mencampur kebijakan industri dengan kepentingan politik jangka pendek**. Industri strategis butuh horizon panjang.

Kelima, **mengabaikan standar lingkungan dan sosial**. Produk Indonesia dapat ditolak pasar global.

Keenam, **menganggap pasar domestik cukup**. Pasar domestik besar, tetapi untuk naik kelas Indonesia tetap membutuhkan ekspor, teknologi, dan investasi global.

Nasionalisme ekonomi yang sehat adalah nasionalisme produktif: memperkuat kemampuan nasional agar mampu bersaing, bukan menutup diri untuk menghindari persaingan.

15. Skenario Masa Depan

Skenario 1: Keterbukaan Strategis dan Industri Naik Kelas

Dalam skenario terbaik, Indonesia memanfaatkan proteksionisme global sebagai momentum. Pasar ekspor didiversifikasi, ASEAN diperkuat, hilirisasi

dijalankan dengan disiplin, industri hijau tumbuh, UMKM ekspor naik kelas, dan standar karbon dipenuhi. Indonesia tidak menutup diri, tetapi menjadi pemain strategis dalam rantai pasok baru.

Skenario 2: Stabil tetapi Lambat Beradaptasi

Dalam skenario moderat, Indonesia tetap menikmati surplus perdagangan dan pasar domestik kuat, tetapi transformasi industri berjalan lambat. Hilirisasi berkembang, tetapi belum cukup dalam. UMKM ekspor masih terbatas. Indonesia tidak krisis, tetapi kehilangan sebagian peluang dari pergeseran rantai pasok global.

Skenario 3: Proteksionisme Defensif dan Rente Domestik

Dalam skenario buruk, Indonesia merespons proteksionisme global dengan proteksi domestik yang tidak disiplin. Industri dilindungi tetapi tidak produktif, biaya konsumen naik, ekspor melemah karena standar global tidak terpenuhi, dan rente kebijakan meningkat. Indonesia tampak berdaulat secara retorik, tetapi daya saingnya turun.

16. Rekomendasi Strategis untuk Indonesia

Pertama, **bangun keterbukaan strategis**. Indonesia harus tetap terbuka terhadap perdagangan dan investasi, tetapi dengan strategi nasional yang jelas: sektor prioritas, standar kinerja, transfer teknologi, dan nilai tambah domestik.

Kedua, **perkuat hilirisasi berbasis produktivitas**. Hilirisasi harus dikaitkan dengan teknologi, pemasok lokal, tenaga kerja terampil, energi bersih, dan ekspor bernilai tambah.

Ketiga, **diversifikasi pasar ekspor**. Indonesia perlu memperluas pasar ke Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika, Amerika Latin, dan pasar regional ASEAN.

Keempat, **perkuat diplomasi perdagangan dan WTO**. Indonesia perlu menjaga sistem berbasis aturan agar negara berkembang tidak dikalahkan oleh kekuatan sepihak negara besar.

Kelima, **siapkan industri menghadapi standar hijau**. CBAM dan standar karbon harus dijawab dengan sistem pengukuran emisi, energi bersih, efisiensi industri, dan sertifikasi.

Keenam, **naikkan kelas UMKM ekspor**. UMKM perlu dukungan sertifikasi, pembiayaan, platform digital, agregator, logistik, dan informasi pasar.

Ketujuh, **perbaiki logistik nasional**. Tanpa logistik efisien, produk Indonesia akan sulit bersaing meskipun tarif rendah.

Kedelapan, **gunakan proteksi secara selektif dan disiplin**. Proteksi harus sementara, transparan, berbasis kinerja, dan dievaluasi.

Kesembilan, **perkuat ASEAN sebagai basis rantai pasok**. Indonesia perlu menjadikan ASEAN sebagai ruang produksi, pasar, dan diplomasi bersama.

Kesepuluh, **hindari rente kebijakan**. Semua insentif industri harus transparan dan tidak boleh menjadi alat patronase.

17. Kesimpulan

Proteksionisme global adalah realitas baru ekonomi-politik dunia. Dunia tidak lagi sepenuhnya bergerak menuju liberalisasi, tetapi juga belum sepenuhnya menutup diri. Yang terjadi adalah fragmentasi selektif: negara tetap berdagang, tetapi lebih berhati-hati; tetap membuka pasar, tetapi lebih strategis; tetap menerima investasi, tetapi lebih selektif; tetap mendukung perdagangan hijau, tetapi juga melindungi industri domestik.

Bagi Indonesia, proteksionisme global bukan alasan untuk takut, tetapi juga bukan alasan untuk menutup diri. Indonesia harus memilih jalan yang lebih cerdas: **keterbukaan strategis**. Keterbukaan strategis berarti Indonesia tetap terhubung dengan dunia, tetapi membangun kapasitas

domestik; tetap menerima investasi, tetapi menuntut transfer teknologi; tetap melakukan hilirisasi, tetapi menjaga standar lingkungan dan produktivitas; tetap melindungi sektor tertentu, tetapi tidak membiarkan proteksi menjadi rente permanen.

Indonesia memiliki modal besar: pasar domestik, sumber daya alam, posisi geografis, ASEAN, mineral kritis, dan tenaga kerja muda. Namun modal itu hanya menjadi kekuatan jika dikelola dengan tata kelola baik. Data ekspor 2025 menunjukkan Indonesia masih mampu mencatat kinerja perdagangan yang kuat, tetapi masa depan tidak dapat bergantung pada pola lama.

([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Kesimpulan utama artikel ini adalah bahwa proteksionisme global menuntut Indonesia untuk menjadi lebih strategis, bukan lebih tertutup. Indonesia harus membangun daya saing dari dalam, memperluas pasar ke luar, dan menjaga tata kelola agar kebijakan industri tidak berubah menjadi rente. Dalam dunia yang semakin proteksionis, bangsa yang menang bukan bangsa yang paling keras menutup pintu, tetapi bangsa yang paling cerdas menentukan kapan membuka pintu, kapan melindungi, dan bagaimana membangun kemampuan sendiri.

Glossarium

ASEAN

Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara; kawasan ekonomi dan politik yang penting bagi integrasi pasar dan rantai pasok Indonesia.

CBAM

Carbon Border Adjustment Mechanism; mekanisme Uni Eropa yang mengenakan biaya karbon pada barang impor tertentu berdasarkan emisi yang terkandung dalam proses produksinya.

Diversifikasi Pasar

Strategi memperluas tujuan ekspor agar suatu negara tidak terlalu bergantung pada sedikit pasar utama.

Dumping

Praktik menjual barang di pasar ekspor dengan harga lebih rendah daripada harga normal atau biaya produksi, yang dapat merugikan produsen negara tujuan.

Global Value Chain

Rantai nilai global, yaitu jaringan produksi lintas negara dari bahan baku, komponen, perakitan, distribusi, hingga layanan.

Green Protectionism

Kebijakan perdagangan yang memakai alasan lingkungan atau karbon, tetapi dapat berdampak membatasi akses pasar bagi negara lain.

Hilirisasi

Proses meningkatkan nilai tambah komoditas melalui pengolahan lebih lanjut di dalam negeri.

Investment Screening

Pemeriksaan atau seleksi investasi asing oleh pemerintah, biasanya dengan alasan keamanan nasional atau sektor strategis.

Kandungan Lokal

Kewajiban menggunakan komponen, tenaga kerja, atau input domestik dalam produksi atau proyek tertentu.

Keterbukaan Strategis

Kebijakan ekonomi yang tetap terbuka terhadap perdagangan dan investasi global, tetapi disertai strategi nasional untuk membangun kemampuan domestik dan melindungi kepentingan publik.

Kuota Impor

Pembatasan jumlah barang tertentu yang boleh diimpor dalam periode tertentu.

Most-Favoured-Nation (MFN)

Prinsip WTO yang mengharuskan perlakuan perdagangan yang sama kepada semua anggota WTO, kecuali dalam kondisi tertentu seperti perjanjian perdagangan bebas.

Non-Tariff Measures

Kebijakan selain tarif yang memengaruhi perdagangan, seperti standar teknis, lisensi, persyaratan kesehatan, kuota, dan prosedur administrasi.

Proteksionisme

Kebijakan negara untuk melindungi produsen atau sektor domestik dari persaingan luar negeri melalui tarif, kuota, subsidi, standar, atau pembatasan lain.

Rantai Pasok

Jaringan produksi dan distribusi yang menghubungkan pemasok bahan baku, produsen, distributor, dan konsumen.

Retaliasi Dagang

Tindakan balasan suatu negara terhadap kebijakan dagang negara lain, misalnya menaikkan tarif sebagai respons atas tarif.

Subsidi Industri

Dukungan pemerintah kepada industri tertentu, seperti insentif pajak, kredit murah, hibah, energi murah, atau dukungan riset.

Tarif

Bea masuk yang dikenakan atas barang impor.

Trade Remedy

Instrumen perlindungan perdagangan yang sah, seperti antidumping, anti-subsidi, dan safeguard, untuk melindungi industri domestik dari praktik perdagangan tidak adil atau lonjakan impor.

WTO

World Trade Organization; organisasi internasional yang mengatur sistem perdagangan multilateral berbasis aturan.

Daftar Pustaka

- Amiti, M., Redding, S. J., & Weinstein, D. E. (2020). Who's paying for the US tariffs? A longer-term perspective. *AEA Papers and Proceedings*, 110, 541–546. <https://doi.org/10.1257/pandp.20201018>
- Bagwell, K., & Staiger, R. W. (2002). *The economics of the world trading system*. MIT Press.
- Baldwin, R. (2016). *The great convergence: Information technology and the new globalization*. Harvard University Press.
- Baldwin, R., & Evenett, S. J. (Eds.). (2009). *The collapse of global trade, murky protectionism, and the crisis: Recommendations for the G20*. CEPR.
- Bown, C. P. (2011). Taking stock of antidumping, safeguards and countervailing duties, 1990–2009. *World Economy*, 34(12), 1955–1998. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9701.2011.01388.x>
- Broda, C., Limão, N., & Weinstein, D. E. (2008). Optimal tariffs and market power: The evidence. *American Economic Review*, 98(5), 2032–2065. <https://doi.org/10.1257/aer.98.5.2032>
- European Commission. (2026). *Carbon Border Adjustment Mechanism*. European Commission.
- Grossman, G. M., & Helpman, E. (1994). Protection for sale. *American Economic Review*, 84(4), 833–850.
- Grossman, G. M., & Helpman, E. (1995). Trade wars and trade talks. *Journal of Political Economy*, 103(4), 675–708. <https://doi.org/10.1086/262003>
- International Monetary Fund. (2026). *World Economic Outlook, April 2026: Global economy in conflict*. IMF.

- Irwin, D. A. (2017). *Clashing over commerce: A history of US trade policy*. University of Chicago Press.
<https://doi.org/10.7208/chicago/9780226399010.001.0001>
- Krugman, P. R. (1987). Is free trade passé? *Journal of Economic Perspectives*, 1(2), 131–144. <https://doi.org/10.1257/jep.1.2.131>
- Krugman, P. R. (1994). Competitiveness: A dangerous obsession. *Foreign Affairs*, 73(2), 28–44. <https://doi.org/10.2307/20045917>
- Melitz, M. J. (2003). The impact of trade on intra-industry reallocations and aggregate industry productivity. *Econometrica*, 71(6), 1695–1725.
<https://doi.org/10.1111/1468-0262.00467>
- OECD. (2026). *OECD Economic Outlook, Interim Report March 2026*. OECD Publishing.
- Rodrik, D. (2004). Industrial policy for the twenty-first century. *CEPR Discussion Paper No. 4767*.
- Rodrik, D. (2007). *One economics, many recipes: Globalization, institutions, and economic growth*. Princeton University Press.
- Rodrik, D. (2018). What do trade agreements really do? *Journal of Economic Perspectives*, 32(2), 73–90. <https://doi.org/10.1257/jep.32.2.73>
- Stiglitz, J. E., & Charlton, A. (2005). *Fair trade for all: How trade can promote development*. Oxford University Press.
<https://doi.org/10.1093/0199290903.001.0001>
- UNCTAD. (2026). *10 trends shaping global trade in 2026*. United Nations Trade and Development.
- World Bank. (2026). *Global Economic Prospects*. World Bank.
- World Trade Organization. (2026). *Global Trade Outlook and Statistics: March 2026*. WTO.
- World Trade Organization. (2026). *Indonesia: Member information*. WTO.

Copilot for this article: ChatGPT, Access date: 24 June 2026. Author's account ([Rudy C Tarumingkeng](#)). <https://chatgpt.com/c/6a388ad7-46fc-83ec-b5c6-bc3ad53631f7>